

ANALISIS ISI OPINI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA

Fitasari Putri Purwandini

Pengajar di Yayasan Galuh Handayani

Jl. Manyar Sambongan No.87-89, Kertajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60282

fitasariputri@gmail.com

Diterima : 4 Maret 2017 | Direvisi : 16 Maret 2017 | Disetujui : 17 Maret 2017

Abstrak

Berdasarkan data kajian Opini Publik pada Surat kabar Jawa Pos edisi Februari 2015 dapat disimpulkan bahwa 1). Issue kebijakan pemerintah ditemukan sebanyak 40 bidang pemberitaan, sektor sandang sebanyak 1 kali, sektor pangan sebanyak 8 kali, sektor papan sebanyak 8 kali, sektor kesehatan sebanyak 9 kali, sektor Pendidikan sebanyak 13 kali. Sector Peran Serta Masyarakat sebanyak 1 kali. Informasi terkait kebijakan pemerintah lainnya seperti sanitasi tidak terekspos oleh surat kabar Jawa Pos edisi Februari. Melihat Surat kabar Jawa Pos terbukti mengutamakan berita dan pendidikan sesuai fungsi media, sebagai sumber informasi. 2) Hasil kajian pada Surat kabar Jawa Pos edisi Februari terkait pemberitaan Subyek Berita, menemukan Frame Tentang Kementerian/Lembaga, bekerja sudah maksimal tetapi belum berhasil. Hal ini karena kurang profesional 3). Kesan berita; terkait pemberitaan kebijakan pemerintah yang di ekspos surat kabar Jawa Pos edisi Februari adalah kesan positif. 4). Jenis kelamin narasumber, lebih besar berjenis kelamin laki-laki saja. Dari pada nara sumber perempuan.

Kata kunci: analisis isi, opini publik, kebijakan pemerintah pusat, bidang sosial, ekonomi, dan budaya

ANALYSIS OF PUBLIC OPINION CONTENT TOWARDS THE CENTRAL GOVERNMENT POLICY IN SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL SECTOR

Abstract

Based on the data of Public Opinion study on Jawa Pos newspaper, February 2015 can be concluded that 1). Issue of government policy found as much as 40 news, clothing sector as much as 1 time, food sector 8 times, board sector 8 times, health sector 9 times, education sector 13 times. Sector Community Participation 1 time. Information related to other government policies such as sanitation is not exposed by Jawa Pos newspaper of February edition. Seeing the Jawa Pos newspaper proved to prioritize news and education according to the function of the media, as a source of information. 2) The results of the study in Jawa Pos of February edition related news reporting, found Frame About the Ministry / Agency, is working maximally but has not successful yet. This is because it is less professional 3). Impression of news; Related to the government's policy exposed in Jawa Pos of February edition is a positive impression. 4). Gender of resources, mostly male. Than female informants

Keywords: content analysis, public opinion, central government policy, social, economic.

PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan peradaban manusia pada zaman modern ini tidak terlepas dari peran media. Mentalitas dan pembentuk karakter manusia tidak bisa terhindar dari gesekan media. Media baik itu media cetak, elektronik maupun internet telah menjadi jembatan arus informasi pada kehidupan manusia. Hilir-mudiknya arus informasi pada media tersebut telah menggiring opini masyarakat menuju sebuah pembentuk citra yang diinginkan. Untuk memperoleh

gambaran dan arah opini publik melalui media maka diperlukan adanya sebuah kajian mengenai isi opini publik yang mengarah pada kebijakan pemerintah sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun sebuah kebijakan. Pada kajian ini media yang diambil adalah media cetak atau surat kabar Jawa Pos yang ada di wilayah kerja BPPKI Surabaya.

Kajian Opini Publik tentang Kebijakan Pemerintah mengambil bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya dengan unit analisis media cetak surat kabar lokal. Kegiatan ini diharapkan dapat memiliki aspek pemanfaatan terutama pemerintah

daerah yang berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknik (UPT) Surabaya yaitu memberikan gambaran dan arah opini publik yang dapat dijadikan agenda dalam penyusunan kebijakan.

Adapun dasar hukum yang melatar belakangi kegiatan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, pasal 532 yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M. KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengatur tentang Peranan media massa dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang ini mengungkapkan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya". Sementara pada pasal 6 ayat (1) menyinggung bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui (*Public's right to know*) dan lembaga pers berperan memenuhinya. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi selain dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, juga terlebih dulu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia (HAM).

Media massa seringkali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk menarik dan mengarahkan perhatian, memengaruhi pilihan sikap, dan membentuk persepsi realitas, serta memengaruhi opini publik. Salah satu asumsi mengenai efek komunikasi massa, menganggap bahwa media massa dengan memberikan perhatian pada isu tertentu dan mengabaikan yang lainnya, akan memiliki pengaruh terhadap pendapat umum. Orang akan cenderung mengetahui tentang hal-hal yang diberitakan dan menerima susunan prioritas yang diberikan media massa terhadap isu-isu yang berbeda.

Dengan menggunakan teori *agenda setting* yang menitikberatkan pada asumsi bahwa "agenda redaksi, bisa menjadi agenda jutaan masyarakat pembacanya." Maka hal tersebut yang menjadikan latar belakang pentingnya analisis isi menggunakan teori Agenda Setting jika melihat realitas bahwa agenda media bukan cuma mampu memengaruhi agenda yang terbentuk pada publik, namun juga dapat secara langsung nantinya memengaruhi agenda kebijakan sebuah negara.

Kerangka Pemikiran Teoritik

Untuk menganalisis media surat kabar, menggunakan teori *agenda setting* yang menawarkan suatu cara untuk menghubungkan temuan dengan kemungkinan terjadinya efek terhadap pendapat. Teori *agenda setting* yang dikemukakan oleh Maxwell Mc Combs dan Donald Shaw dalam *Public Opinion Quarterly*, adalah salah satu teori tentang proses dampak media atau efek komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. *Agenda setting* menggambarkan kekuatan pengaruh media yang sangat kuat terhadap pembentukan opini masyarakat, karena media memberi tekanan pada suatu peristiwa maka media itu akan memengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting (Rakhmat,2007).

Stephen W. Littlejohn (1992) mengatakan, *agenda setting* beroperasi dalam tiga bagian sebagai berikut. 1. Agenda media itu sendiri harus diformat. Proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali; 2. Agenda media dalam banyak hal memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media mampu memengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya; 3. Agenda publik memengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu.

Menurut Manhein agenda media terdiri dari dimensi: 1. *Visibility* (visibilitas), yakni jumlah dan tingkat menonjolnya acara; 2. *Audience salience* (tingkat menonjol bagi khalayak), yakni relevansi isi acara dengan kebutuhan khalayak; 3. *Valence* (valensi), yakni

menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. Untuk agenda publik, dimensi-dimensinya adalah: 1. *Familiarity* (keakraban, derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu); 2. *Personal salience* (penonjolan pribadi (relevansi kepentingan dengan ciri pribadi)); 3. *Favorability* (kesenangan pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita).

Untuk agenda kebijakan, dimensi-dimensinya adalah: 1. *Support* (dukungan (kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu)); 2. *Likelihood of action* (kemungkinan kegiatan (kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan)); 3. *Freedom of action* (kebebasan bertindak (nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah)). Dalam model *agenda setting*, media memiliki kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan peristiwa mana yang lebih penting menjadi pusat perhatian dan akan memberikan argumen mengapa suatu isu atau seseorang layak diperhatikan. Media dalam hal ini memiliki abilitas untuk memengaruhi apa yang penting bagi publik, memengaruhi pendapat publik bahkan media mampu memengaruhi tindakan apa yang harus dilakukan publik terhadap satu fenomena tertentu yang diselipkan dalam agenda media.

Dalam teori *agenda setting*, salah satu keunggulan dari adanya media massa adalah bahwa ia mampu menjangkau khalayak, selain itu media massa juga berperan dalam menambah pengetahuan, mengubah perilaku maupun mengubah pendapat dengan suatu maksud tertentu yang ingin dicapai. Tidak hanya itu, khalayak selalu memunyai rasa ingin tahu tentang kejadian yang ada di sekitarnya, tapi mereka tidak bisa memenuhi rasa ingin tahu itu tanpa bantuan pihak lain. Dalam hal ini dibutuhkan suatu pranata atau lembaga yang dapat mencari informasi dan dapat memenuhi kebutuhan khalayak.

METODOLOGI PENELITIAN

Analisis Isi

Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor

analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian. Sebuah teks berita bisa menjadi bahan kajian yang komprehensif tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Apakah dilihat dari sudut kepentingan masyarakat, kepentingan Negara atau kepentingan pihak lain yang turut bermain dalam opini publik.

Opini publik atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan *public opinion* merupakan pendapat sekelompok masyarakat atau seseorang yang tercipta dari sebuah diskusi yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu masalah. *Public opinion* biasanya berasal dari orang-orang dewasa. Menurut Dan Nimmo opini publik bisa terjadi melalui kegiatan verbal dan nonverbal yang menyajikan citra dan interpretasi individu tentang objek tertentu. Objek-objek itu misalnya isu yang diperdebatkan, tindakan atau pemikiran yang kontroversial dan hal-hal baru yang bisa mempengaruhi banyak element. Dalam opini publik yang dilihat bukan pada aspek kuantitas atau pada jumlah mayoritas (*numerical majority*) tetapi pada mayoritas yang efektif (*effective majority*).

Isi media adalah dasar dari pengaruh yang kuat dari media massa. Isi media – sebagian terbesar merupakan bagian yang terbuka dan layak dipelajari dalam sebuah proses Komunikasi massa. Ada sejumlah cara atau metode menelaah isi teks media, salah satunya dan yang masih banyak dilakukan adalah analisis isi kuantitatif. Analisis isi kuantitatif seringkali disebut juga analisis isi tradisional atau konvensional. Analisis isi melihat teks berita sebagai kumpulan stimulus psikologis dengan makna yang dapat diidentifikasi secara objektif. Sedangkan analisis wacana merupakan bentuk analisis teks media yang relatif baru yang berkembang terutama sejak tahun 1970-an, seiring dengan studi mengenai struktur, fungsi dan proses dari suatu teks.

Teknik Analisis Isi

Analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan cara menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis (Holsti dalam Fluornoy, 1989). Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mempunyai pendekatan sendiri dalam menganalisis data. Pendekatan ini tidak seperti mengamati langsung perilaku orang atau mewawancarai orang, namun si peneliti mengambil komunikasi-komunikasi atau data yang telah dihasilkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang komunikasinya (Kerlinger, 1973).

Berelson dalam Holsti (1969), menyebutkan bahwa teknik penelitian yang menggunakan analisis isi bisa menggambarkan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang isi komunikasi yang tersurat. Objektivitas dicapai dengan menggunakan kategori analisis yang diklasifikasi secara tepat sehingga orang lain yang menggunakannya untuk menganalisis isi yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Sistematis diartikan bahwa prosedur tertentu diterapkan dengan cara yang sama pada semua isi yang dianalisis. Sementara kuantitatif mengandung pengertian penelitian ini dicerminkan dalam data kuantitatif atau melalui perhitungan angka.

Kegiatan Analisis Isi Opini Publik ini akan mengamati aspek pemberitaan Informasi Dasar (*Basic Needs*) serta aspek kebijakan pengelolaan Informasi Dasar. Kegiatan ini tidak bermaksud menguji kedua aspek tersebut. Kegiatan ini pada satu sisi hanya melakukan analisis isi terhadap pemberitaan Informasi Dasar yang ada di surat kabar. Analisis isi opini publik ini menggunakan rujukan Teori Agenda Setting pada First Level Agenda Setting.

Analisis Isi ini didasarkan pada paling tidak dua asumsi utama. Pertama bahwa teks berita itu sendiri dipandang sebagai sesuatu yang objektif, dan dapat menangkap realitas sehingga tidak menimbulkan kemenduaan arti. Kedua, frekuensi atau pengukuran atas teks yang dipilih tersebut juga dapat mengungkapkan arti yang sebenarnya secara objektif. (Analisis Wacana, karya Eriyanto (2001)

Hal ini berbeda dengan analisis isi yang memang bertujuan melakukan generalisasi,

bahkan melakukan prediksi. Artinya, pada saat mengambil sample, uji statistik yang biasa dilakukan dalam analisis isi secara tidak langsung memang bertujuan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat menggambarkan fenomena keseluruhan dari suatu isu atau peristiwa. Kalau keadaan dan kondisi yang kita teliti sama maka akan menghasilkan kajian yang sama pula.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam mendapatkan hasil penelitian yang memiliki asas manfaat bagi stakeholder terkait yang nantinya dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi dalam pembuatan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik untuk kepentingan stakeholder yang terkait dan masyarakat.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam teknik penelitian ini adalah :

1. Memilih sample dari populasi yang pada akhirnya nanti digunakan untuk menggeneralisir hasil penelitian. Sample pada kajian ditentukan secara purposive dengan memilih surat kabar harian Jawa Pos mulai tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2015. Penunjukkan surat kabar Jawa Pos dikarenakan memiliki oplah terbesar diantara surat kabar lainnya yang terbit di Jawa Timur.
2. Menetapkan kerangka konsep dan kategori yang akan diteliti.
3. Memilih unit analisis yang akan dipakai dalam analisis.

Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh rubrikasi yang berkaitan dengan informasi dasar pada surat kabar yang meliputi : Berita (Headline, berita utama,) opini (pojok, artikel, tajuk).

4. Menyesuaikan isi dengan kerangka kategori, per satuan unit yang dipilih. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian khususnya yang berkenaan dengan pemberitaan informasi dasar digunakan teknik analisis isi sebagaimana terminologi Berelson. Dalam hal ini pemrosesan informasi yang menyangkut isi-isi komunikasi yang telah dibuat kategorisasinya, dimasukkan ke dalam tabel frekuensi dan selanjutnya dianalisis menurut frekuensi pemunculan yang kemudian diinterpretasi dan

dibandingkan. Analisis dilakukan secara kualitatif.

5. Mengungkapkan distribusi menyeluruh dari frekuensi yang telah didapat dalam penelitian. Ini umumnya ditandai dengan adanya tabulasi hasil penelitian menurut distribusi dan

variable yang akan diteliti. Hal ini akan dibahas pada tabulasi dan interpretasi data dibawah ini :

Tabel 1. Jenis Informasi

No.	Jenis Informasi	Subinformasi
	Informasi sandang	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas produk sandang • Produk sandang dalam negeri • Etika berbusana • Kebijakan pemerintah terkait sandang • Lainnya :
	Informasi pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Harga sembako • Ketersediaan bahan pokok • Pasar tempat memperoleh sembako • Standar gizi pangan • Cara dan kebiasaan konsumsi pangan • Kualitas yang aman dan baik bagi pangan • Kebijakan pemerintah terkait pangan • Lainnya :
	Informasi papan	<ul style="list-style-type: none"> • Harga bahan bangunan • Harga bahan property • Standar rumah sehat dan layak huni • Fasilitas pembiayaan perumahan • Bantuan pemerintah untuk perumahan rakyat • Kebijakan pemerintah mengenai perumahan • Lainnya :
	Informasi kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pola perilaku hidup sehat • Obat dan pengobatan tradisional • Kebijakan pemerintah mengenai kesehatan • Lainnya :
	Informasi Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana sanitasi dasar (Kakus, septic tank, MCK) • Pengelolaan air minum dan makanan • Ketersediaan fasilitas cuci tangan di lokasi-lokasi pelayanan umum • Pengelolaan limbah rumah tangga • Pengelolaan sampah rumah tangga • Kebijakan pemerintah mengenai sanitasi • Lainnya :
	Informasi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pendidikan • Informasi Beasiswa • Kualitas pendidikan / akreditasi program dan lembaga pendidikan • Kebiasaan pendidikan pengajaran • Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan • Lainnya :

HASIL DAN ANALISIS

Pada Tabel 1 temuan data mengenai sajian berita surat kabar Jawa Pos sesuai dengan bidang pembangunan yang telah dikategorikan dalam (KOP), yakni bidang sosial, ekonomi, kesehatan,

	Letak Pemberitaan	Frekuensi	Persen
1	Halaman Utama (Headlines)	4	10,0
2	Halaman Depan Dalam	1	2,5
3	Halaman Tengah	34	85,0
4	Halaman Belakang	1	2,5
	Jumlah	40	100,0

sanitasi, budaya, dengan berbagai sumber berita. Sumber berita tersebut mengandung kebijakan bisa dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Dari pemerintah pusat biasanya setingkat eselon satu atau bisa presiden, wakil presiden atau menteri.

Tabel 2. Topik Informasi berita

No	Topik informasi Pemberitaan	Frekuensi	Persen
1	Informasi Sandang	1	2,5
2	Informas Pangan	8	20,0
3	Informas Papan	8	20,0
4	Informasi Kesehatan	9	22,5
5	Sanitasi	0	0,0
6	Informasi Pendidikan	13	32,5
7	Peran Serta Masyarakat	1	2,5
	Jumlah	40	100,0

Sumber: surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat pada tabel 2. Pemberitaan surat Kabar Jawa Pos pada bulan februari yang memuat beragam topik informasi berita, yakni; informasi sandang hanya 1 kali (2,5 %). Informasi Informas Pangan sebanyak 8 kali (20,0). Informasi Papan sebanyak 8 kali (20,0). Informasi Kesehatan sebanyak 9 kali (22,5). informasi Pendidikan sebanyak 13 kali (32,5). Informasi Peran Serta Masyarakat sebanyak 1 kali (2,5). Informasi lainnya seperti sanitasi, kosong/nihil. Dengan merujuk temuan data diatas maka informasi pendidikan masih menjadi prioritas utama dalam program pemerintah, yang ke dua informasi kesehatan karena arti kesehatan itu sendiri dimana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai dengan fungsinya dan sebagaimana mestinya secara sederhana, sehat sinonim dengan kondisi tidak sakit.

Urutan ketiga papan dan pangan **Pengertian pangan** menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 adalah

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan papan adalah sebuah tempat tinggal yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia.

Tabel 3. Letak Pemberitaan
Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat tabel 3. Maka letak berita kebijakan pemerintah, ada dihalaman dalam sebanyak 4 kali (10,0). Ada di halaman depan dalam 1 kali (2,5). Ada di halaman tengah sebanyak 34 kali (85,0). Dan ada dihalaman Belakang 1 kali (2,5). Merujuk pada letak pemberitaan diatas bahwa paling banyak pemberitaan di dalam halaman tengah karena di halaman tengah lebih luas dan ada beberapa lembar kolom berita.

Tabel 4. Informasi Sandang

No	Berita	Frekuensi	Persentase
1	Kualitas Produk Sandang	1	2,5
2	Produk Sandang Dalam Negeri	0	0
3	Etika Berbusana	0	0
4	Kebijakan Pemerintah Terkait Sandang	0	0
5	Lainnya	39	97,5
	Jumlah	40	100

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 4 memberi gambaran bahwa terbitan surat kabar Jawa Pos edisi bulan Februari, informasi produk sandang 1 kali (2,5). Lainnya yakni berita yang tidak terkait dengan kebijakan dibidang, pembangunan sosial, ekonomi dan budaya sebanyak 39 kali (97,5%). Total 100.0%. Merujuk pada berita terkait sandang sama sekali belum ada kebijak untuk pemberitaan etika berbusana tetapi jika kita melihat foto- foto etika berbusana dalam iklan di jawa pos kesopanan masih terjaga dan masih memperlihatkan adat budaya ketimuran.

Tabel 5. Informasi Pangan

No	Berita	Frekuensi	Persentase
1	Harga Sembako	6	15,0

2	Ketersediaan Bahan Pokok	1	2,5
3	Pasar Tempat Memperoleh Sembako	0	0,0
4	Standar Gizi Pangan	1	2,5
5	Cara dan Kebiasaan Konsumsi Pangan	0	0,0
6	Kualitas yang aman dan baik bagi pangan	0	0,0
7	Kebijakan Pemerintah Terkait Pangan	0	0,0
8	Lainnya	32	80,0
	Jumlah	40	100,0

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 5 memberi gambaran bahwa terbitan surat kabar Jawa Pos edisi bulan february yakni; Informasi Harga sembako terbit 6 kali (15,0 %). Informasi ketersediaan bahan pokok terbit 1 kali (2,5 %). Informasi standar gizi pangan terbit 1 kali (2,5). Untuk pemuatan berita lainnya terbit 32 kali (80, 0 %). Total 100,0 % . merujuk pada informasi pangan, harga sembako paling banyak diekspus karena mengijak tahun baru biasanya harga bahan pokok melambung tinggi, setiap menjelang tahun baru hargabahan dasar selalu naik. Pada bulan Februari harga masih belum turun bahkan sulit turun.

Tabel 6. Informasi Papan

No	Berita	Frekuensi	Persentase
1	Harga bahan bangunan	1	2,5
2	Harga bahan property	3	7,5
3	Standar Rumah Sehat dan Layak Huni	2	5,0
4	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	2	5,0
5	Bantuan Pemerintah (Perumahan Rakyat)	0	0,0
6	Kebijakan Pemerintah (Perumahan)	0	0,0
7	Lainnya	32	80,0
	Jumlah	40	100

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 6. Memberi gambaran bahwa terbitan surat kabar Jawa Pos edisi Februari menerbitkan; informasi harga bahan property sebanyak 3 kali (7,5%). Informasi Standar Rumah Sehat dan Layak Huni tebit 1 kali (2,5%). Informasi Bantuan Pemerintah (Perumahan Rakyat) Jawa Pos tidak menerbitkan. Sedangkan untuk pemuatan berita lainnya sebanyak 34 kali (85 %). Total 100 %.

Tabel 7. Informasi Kesehatan

No	Berita	Frekuensi	Persentase
1	Pola Perilaku Hidup Sehat	5	12,5
2	Obat & pengobatan tradisional	2	5,0
3	Kebijakan Pemerintah (Kesehatan)	2	5,0
4	Lainnya	33	77,5
	Jumlah	40	100,0

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 7 Memberi gambaran bahwa terbitan surat kabar Jawa Pos edisi Februari menerbitkan; Informasi Pola Perilaku Hidup Sehat sebanyak 5 kali (12,5 %). Informasi Obat & pengobatan tradisional sebanyak 2 kali (5,0 %). Informasi kebijakan Pemerintah terkait kesehatan sebanyak 2 kali (5,0 %). Sedangkan untuk pemuatan berita lainnya sebanyak 33 kali (77, 5 %). Total 100,0 %. Bila merujuk pada informasi kesehatan, pola hidup sehat menjadi prioritas yang utama untuk masyarakat karena mempunyai tujuan dan maksud supaya hidup tidak sakit-sakitan. Dengan kesehatan maka aktifitas akan berjalan normal.

Tabel 8. Informasi sanitasi (kakus, septic tank, MCK)

Informasi Sanitasi			
No	Berita	Frekuensi	Persentase
1	Sarana sanitasi dasar	0	0,0
2	Pengelolaan Air Minum dan Makanan	0	0,0
3	Ketersediaan Fasilitas Cuci Tangan Di Lokasi Pelayanan Umum	0	0,0
4	Pengelolaan Limbah Rumah Tangga	0	0,0
5	Pengelolaan sampah rumah tangga	0	0,0
6	Kebijakan Pemerintah (Sanitasi)	0	0,0
7	Lainnya	40	100,0
	Jumlah	40	100,0

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 8 Memberi gambaran bahwa terbitan surat kabar Jawa Pos edisi Februari tidak menerbitkan; Informasi terkait sanitasi (kakus, septic tank, MCK), jadi edisi Februari Jawa Pos menerbitkan berita lainnya diluar berita kebijakan informasi sanitasi (kakus, septic tank, MCK). Jika merujuk pada kebijakan pemerintah terkait informasi sanitasi, maka masyarakat belum memahami tentang

bagaimana hidup sehat dengan memanfaatkan ketersediaan fasilitas cuci tangan di lokasi pelayanan umum hal ini sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masih belum familier padahal termasuk kebersihan untuk menjaga kesehatan.

Tabel 9. Informasi Pendidikan

No	Berita	Frekuensi	Persentase
1	Biaya Pendidikan	3	7,5
2	Informasi Beasiswa	2	5,0
3	Kualitas pendidikan/akreditasi program dan lembaga pendidikan	3	7,5
4	Kebiasaan Pendidikan Pengajaran	2	5,0
5	Kebijakan Pemerintah (Pendidikan)	3	7,5
6	Lainnya	27	67,5
	Jumlah	40	100,0

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 9. Memberi gambaran bahwa terbitan surat kabar Jawa Pos edisi Februari menerbitkan; informasi Biaya Pendidikan sebanyak 3 kali (7,5 %). Informasi Beasiswa sebanyak 2 kali (5,0%). Informasi Kualitas pendidikan/akreditasi program dan lembaga pendidikan sebanyak 3 kali (7,5 %). Informasi Kebiasaan Pendidikan Pengajaran sebanyak 2 kali (5,0 %). Informasi Kebijakan Pemerintah terkait Pendidikan sebanyak 3 kali (7,5 %). Untuk informasi lainnya sebanyak 27 kali (67,5 %). Total 100,0 %.

Tabel 10. Tokoh Utama Berita

No	Tokoh	Frekuensi	Persentase
1	Pejabat Eksekutif	8	20,0
2	Non pejabat eksekutif	16	40,0
	lainnya	16	40,0
	Jumlah	40	100,0

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 10. Memberi gambaran bahwa surat kabar Jawa Pos edisi Februari pemberitaan terkait; Tokoh Utama Berita Pejabat Eksekutif sebanyak 8 kali (20,0 %). Non pejabat eksekutif sebanyak 16 kali (40,0 %), untuk informasi lainnya sebanyak 16 kali (40,0 %). Total 100,0 %. Jika merujuk pada informasi tokoh utama berita maka non pejabat eksekutif yang lebih dominan dibandingkan dengan pejabat eksekutif.

Tabel 11. Subyek Berita

No	Frame Tentang Kementerian/Lembaga	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Bekerja	0	0,0
2	Belum Bekerja Maksimal	7	17,5
3	Bekerja Maksimal Belum Berhasil	11	27,5
4	Bekerja Maksimal Berhasil	6	15,0
5	Lainnya	16	40,0
	Jumlah	40	100,0

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 11. Memberi gambaran bahwa surat kabar Jawa Pos edisi Februari terkait pemberitaan Subyek Berita, Frame Tentang Kementerian/Lembaga, belum bekerja maksimal sebanyak 7 kali (17,5 %). Bekerja Maksimal Belum Berhasil sebanyak 11 kali (27,5 %). Bekerja Maksimal Berhasil sebanyak 6 kali (15,0 %). Lainnya sebanyak 16 kali (40,0 %). Total 100,0 %. Jika merujuk pada informasi subyek berita maka pemerintah telah bekerja secara maksimal tetapi belum berhasil hal ini disebabkan karena para pejabat kurang profesional dalam menjalankan pekerjaan.

Tabel 12. Subyek Berita

No.	Frame Tentang Pejabat Eksekutif	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Profesional	0	0,0
2	Kurang Profesional	7	17,5
3	Sangat Profesional	6	15,0
4	Lainnya	27	67,5
	Jumlah	40	100,0

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 12 memberi gambaran bahwa surat kabar Jawa Pos edisi Februari terkait, Frame Tentang Pejabat Eksekutif, Kurang Profesional sebanyak 7 kali (17,5 %). Sangat Profesional sebanyak 6 kali (15,0 %). Untuk lainnya sebanyak 27 kali (87,5 %). Total 100,0 %. Merujuk pada informasi subyek berita, pejabat dalam melakukan pekerjaan belum profesional ini terbukti bahwa pejabat belum berhasil dalam menjalankan pekerjaannya.

Tabel 13. Berita Pendapat

No.	Laporan Berita	Frekuensi	Persentase
1	Editorial/Tajuk Rencana	1	2,5

2	Kolom/komentar oleh staf jurnalis	0	0,0
3	Kolom/komentar oleh penulis luar yang diedit oleh editor	1	2,5
4	Surat untuk dewan redaksi	0	0,0
5	Berita	38	95,0
	Jumlah	40	100,0

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 13 memberi gambaran bahwa surat kabar Jawa Pos edisi Februari terkait Laporan Berita, terkait kebijakan pemerintah seperti; Editorial/Tajuk Rencana di ekspos sebanyak 1 kali (2,5 %). Kolom/komentar oleh staf jurnalis tidak terekspos, Kolom/komentar oleh penulis luar yang diedit oleh editor sebanyak 1 kali (2,5 %). Surat untuk dewan redaksi tidak terekspos, berita dll terekspos sebanyak 38 kali (95 %). Total 100 %. Merujuk pada laporan berita yang dominan adalah berita, terkait dengan laporan berita berarti Jawa Pos memang mengutamakan berita dari pada rubrik yang lain.

Tabel 14. Kesan Umum/Isi Berita

No.	Pendapat	Frekuensi	Persentase
1	Positif	18	45,0
2	Netral	12	30,0
3	Negatif	1	2,5
4	lainnya	9	22,5
	Jumlah	40	100,0

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 14 memberi gambaran bahwa surat kabar Jawa Pos edisi Februari terkait, Kesan Umum/Isi Berita; positif sebanyak 18 kali (45,0 %). Netral sebanyak 12 kali (30,0 %). Negatif sebanyak 1 kali (2,5 %). Lainnya sebanyak 9 kali (22,5 %). Total 100,0 %. Kesan umum isi berita pada kajian jawa pos lebih kepositif daripada netral atau negatif.

Tabel 15. Jenis Kelamin Narasumber

No.	Narasumber	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	31	77,5
2	Perempuan	9	22,5
	Total	40	100,0

Sumber surat kabar Jawa Pos Februari 2015

Melihat temuan pada tabel 15 memberi gambaran bahwa surat kabar Jawa Pos edisi

Februari terkait, Jenis Kelamin Narasumber ; Laki-laki sebanyak 31 kali ekspos (77,5 %). Perempuan hanya 9 kali ekspos (22,5 %). Nara sumber laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan nara sumber perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data kajian opini publik pada surat kabar Jawa Pos edisi Februari 2015 dapat disimpulkan bahwa

1. Issue kebijakan pemerintah ditemukan sebanyak 40 bidang pemberitaan, sektor sandang sebanyak 1 kali, sektor pangan sebanyak 8 kali, sektor papan sebanyak 8 kali, sektor kesehatan sebanyak 9 kali, sektor Pendidikan sebanyak 13 kali. Sektor Peran Serta Masyarakat sebanyak 1 kali. Informasi terkait kebijakan pemerintah lainnya seperti sanitasi tidak terekspos oleh surat kabar Jawa Pos edisi Februari. Melihat Surat kabar Jawa Pos terbukti mengutamakan berita dan pendidikan sesuai fungsi media, sebagai sumber informasi.
2. Hasil kajian pada surat kabar Jawa Pos edisi Februari terkait pemberitaan Subyek Berita, menemukan Frame Tentang Kementerian/Lembaga, bekerja sudah maksimal tetapi belum berhasil. Hal ini karena kurang profesional
3. Kesan berita; terkait pemberitaan kebijakan pemerintah yang di ekspos surat kabar Jawa Pos edisi Februari adalah kesan positif.
4. Jenis Kelamin Narasumber, lebih besar berjenis kelamin laki-laki saja. Sedangkan nara sumber perempuan lebih kecil dibandingkan jenis kelamin laki-laki.
5. Opini publik mengarah pada kesan positif pada pemberitaan kebijakan pemerintah yang diekspos surat kabar Jawa pos dan arah negatifnya terkait pemberitaan subyek berita menemukan frame tentang kementerian/lembaga, bekerja sudah maksimal belum berhasil karena kurang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2001. Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media Yogyakarta: LKIS.

- Griffin, EM. 2012. *A First Look At Communication The Theory. Eighth Edition.* McGraw Hill, New York.
- Laswell, H. D. 1971. "The Structure and Function of Communication in Society", dalam Schramm, W. Dan Roberts, DE (eds), *The Process and Effects of mass communication, revised editon*, Urbana: University of Illinois Press.
- Severin Werner J- Tankard James W. 2005. *Teori Komunikasi*, Prenada Jakarta
- Shah, Dhavan V., Douglas M McLeod, Melissa R. Gotlieb, dan Nam-Jin Lee dalam Nabi, Robion L. dan Mary Beth Oliver dalam *Framing and Agenda Setting, The Handbook of Media Processes and Effects.* 2009. SAGE Publications, Thousand Oaks, California.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi* penerbit PT Remaja Karya Bandung.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Teori Kebutuhan Maslow. praswck.com/aktualisasi-diri-menurut-abraham-maslow. 2015.